

Judul : Zero truck ODOL mulai 2027, kurangi gejolak, siapkan sosialisasi
Tanggal : Kamis, 07 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Zero Truck ODOL Mulai 2027

Kurangi Gejolak, Siapkan Sosialisasi

DPR bersama Pemerintah dan asosiasi pengemudi logistik sepakat membentuk tim bersama merumuskan kebijakan *Zero Truck Over Dimension Over Loading* (ODOL). Kebijakan tersebut akan diterapkan tahun 2027. Tujuannya, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan yang setiap tahun menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembentukan tim bersama ini menindaklanjuti perhatian Presiden Prabowo terkait kebijakan Zero ODOL ini.

"Kami akan merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman asosiasi logistik nusantara," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Diketahui, DPR dan pemerintah sepakat melarang truk ODOL beroperasi di jalan raya mulai 2027.

Kesepakatan itu muncul setelah pembahasan final antara pemerintah, asosiasi logistik, dan DPR di Gedung DPR, Senayan, Senin (4/8/2025). Ke-

bijakan zero ODOL merupakan larangan total bagi kendaraan barang yang melebihi dimensi dan muatan standar.

Dasco mengatakan, arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, yaitu meminta seluruh pihak menyusun kebijakan teknis untuk memastikan zero ODOL dapat terwujud paling lambat pada 2027.

Anggota Komisi V DPR Syafluddin meminta Pemerintah menyiapkan peraturan teknis pelaksanaan dan sosialisasi secara masif terkait kebijakan penerapan zero ODOL ini. Larangan itu untuk menjaga keselamatan lalu lintas, memperpanjang usia infrastruktur jalan dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik nasional.

"Kebijakan ini sejalan dengan upaya reformasi sektor transportasi darat yang menekankan keselamatan, keadilan, dan keberlanjutan," ujar Syafluddin dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).

Dia mengingatkan, keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan persiapan matang



Sufmi Dasco Ahmad

di semua lini. Salah satunya, pemerintah harus melakukan sosialisasi yang masif, terstruktur, dan tepat sasaran.

"Tujuannya agar para pengusaha logistik, operator transportasi, dan sopir truk dapat mempersiapkan diri sejak dini," imbuh politikus PKB ini.

Syafluddin menambahkan, sosialisasi perlu melibatkan seluruh

pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pengusaha truk, perusahaan logistik, hingga komunitas sopir di berbagai daerah.

Dengan begitu, adaptasi terhadap aturan baru dapat berjalan lebih lancar dan mengurangi potensi gejolak di lapangan.

Untuk itu, Syafluddin mendorong Pemerintah menyiapkan skema dukungan bagi pelaku usaha logistik yang terdampak, seperti akses pembiayaan untuk peremajaan armada, insentif pajak, atau program pelatihan sopir.

"Kebijakan zero ODOL bukan hanya soal menertibkan, tetapi juga memastikan ekosistem logistik nasional tetap berjalan efisien dan adil bagi semua pihak," tandasnya.

Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API) Suroso menegaskan, pengemudi sepakat mengawal kebijakan menuju zero ODOL 2027.

"Kita sudah sepakat semua zero odol 2027 harus dijalankan di negeri kita ini," tegas Suroso dalam keterangannya, Senin (4/8/2025).

Suroso menyampaikan terima kasih karena DPR telah menjembatani para pengemudi yang turut berkontribusi terhadap perputaran ekonomi nasional.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, pihaknya akan menyiapkan teknis pelaksanaan sesuai hasil kesepakatan antara pemerintah, asosiasi logistik, dan DPR.

"Pemerintah akan mengawal proses ini dengan dukungan regulasi yang jelas, teknis yang terukur, dan komunikasi yang intensif dengan para pengemudi," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Sebagai langkah awal, kata Dudy, akan dibentuk tim teknis lintas sektor yang melibatkan DPR, pemerintah, dan perwakilan pengemudi untuk menyusun roadmap implementasi Zero ODOL 2025-2027.

Tim ini akan mengatur tahapan pemeriksaan, penyesuaian dimensi dan muatan kendaraan, hingga mekanisme penegakan hukum secara bertahap dan berkeadilan. ■ TF